

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad, A., & Maskanah, U. (2020). *Hukum Acara Perdata - Teori dan Praktik*. Logoz Publishing.
- Adi, I. R. (2005). *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Pengantar pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan*. UI-Press.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*. Konstitusi Press.
- Asyhadie, Z. (2008). *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Atikah, I. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. CV. Haura Utama.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Kencana.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Suatu Studi tentang Prinsip Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*. Bina Ilmu.
- Kusumaatmadja, M., & Sidharta, B. A. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Alumni.
- Maimun. (2004). *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*. PT. Pradnya Pramita.
- Mas, M. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Midah, A. (2010). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*. Ghalia Indonesia.
- Mukti, R. (2021). *Pekerja Formal dan Informal Provinsi Jawa Barat 2020*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
- Purwoko, B. (2010). *Sistem Jaminan Sosial: Asas, Prinsip, Sifat Kepesertaan, dan Tata-Kelola Penyelenggaraan di Beberapa Negara*.
- Putri, A. E. (2014a). *Seri Buku Saku - 1: Paham SJSN Sistem Jaminan Sosial Nasional*. CV. Komunitas Pejaten Mediatama.
- Putri, A. E. (2014b). *Seri Buku Saku 2: Paham BPJS*. Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Putri, A. E. (2020). *Seri Buku Saku 5: Paham JKK dan JKM*. Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Rys, V. (2011). *Merumuskan Ulang Jaminan Sosial: Kembali ke Prinsip-prinsip Dasar*. Alvabet.
- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Universitas Sebelas Maret.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.
- Soepomo, I. (1983). *Pengantar Hukum Perburuhan*. Djambatan.
- Spicker, P. (1995). *Social Policy: Theory and Practice*. Policy Press.
- Sumitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Sutrasno, S. A., & Purnomosidi, A. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum*. CV. Media Sains Indonesia.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyakit Akibat Kerja.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua.
- Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Di Kota Cimahi.

## C. Sumber Lainnya

- Abdallah, R. I., Nathanael, K., Hayatuddin, R. R., & Hendarwin, R. (2023). Pelaksanaan Kontrak Kerja Antara Pekerja Dengan Perusahaan. *Zona Hukum Jurnal Hukum*.  
<https://www.researchgate.net/publication/376305813>
- Abdullah, J. (2018). Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial Dan Manfaatnya Bagi Tenaga Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 9(1), 121–135.
- Administrator. (2014, April 30). *BPJS dan Pemkot Cimahi Sepakati Perlindungan Tenaga Kerja*. <https://cimahikota.go.id/berita/detail/78111-bpjs-dan-pemkot-cimahi-sepakati-perlindungan-tenaga-kerja>
- Administrator. (2019, Oktober 14). *Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kota Cimahi*. <https://cimahikota.go.id/index.php/artikel/detail/1158-program-kartu-indonesia-sehat-%28kis%29-di-kota-cimahi>

- Administrator. (2020, Juni 24). *Dinkes Cimahi Terus Tingkatkan Pelayanan*.  
<https://cimahikota.go.id/index.php/berita/detail/81027-dinkes-cimahi-terus-tingkatkan-pelayanan>
- Arfiah, S., & Setiadi, Y. B. (2012). Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja Dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) (Studi Kasus Pada Pt Batik Keris Sukoharjo). *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 22(1), 10–17.
- Barid, V. B. (2021). *Urgensi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Informal Di Indonesia*.  
<https://www.researchgate.net/publication/354895146>
- Cahya, N. P., & Asyhadie, Z. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja / Buruh Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Berdasarkan Pp Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Studi Pada PT. Narmada Awet Muda). *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 3(3), 605–612.
- Cimahi, B. (2024). *Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kota Cimahi (Jiwa), 2022-2023*.  
<https://cimahikota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjUwIzI=/jumlah-penduduk-15-tahun-ke-atas-yang-bekerja-menurut-status-pekerjaan-utama-di-kota-cimahi.html>
- Damanik, J. (2011). Menuju Pelayanan Sosial yang Berkeadilan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 15(1), 1–14.
- Dewi, N. K., Zakariya, H., & Yudianto, D. (2022). Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja yang Tidak Terdaftar BPJS. *Jurnal Serambi Hukum*, 15(02), 69–81.
- Fatimah, S. (2023, Desember 12). *Kampanye Kerja Keras Bebas Cemas, BPJS Ketenagakerjaan Menyasar Pekerja Informal*.  
<https://jabar.tribunnews.com/2023/12/12/kampanye-kerja-keras-bebas-cemas-bpjs-ketenagakerjaan-menyasar-pekerja-informal>
- Haryanto, A. (2020, Juli 10). *BP Jamsostek Cimahi Sosialisasikan Manfaat Program Perlindungan ke LPK*. 2020.  
<https://daerah.sindonews.com/read/97198/701/bp-jamsostek-cimahi-sosialisasikan-manfaat-program-perlindungan-ke-lpk-1594393660>
- Hasrianti, Qomariyah, E., & Sartono. (t.t.). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bpjs Ketenagakerjaan Pada Ud. Mete Mubaroq Lombe Kota Kendari. *Business UHO: Jurnal Administrasi Bisnis*.
- Hennigusnia, & Kurniawati, A. (2021). Tinjauan Konstitusi Terhadap Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 16(2), 103–120.  
<https://doi.org/10.47198/naker.v16i2.105>
- Purwoko. Bambang. (2012). Konsepsi Pengawasan Operasional Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Terhadap Kegiatan Operasional Badan

- Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(2), 255–274.
- Siregar, W. H., & Kristian, R. (2023). Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Dalam Meningkatkan Jaminan Sosial Di Pasar Sambas Kota Medan. *Journal of Science and Social Research*, 6(1), 269–279.
- Suadu, R. H. (2015). Hubungan Kontraktual Antara Peserta Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. *Lex et Societatis*, 3(10), 38–44. <http://m.kompasiana.com/dwinurmawaty/kontrak->
- Syahputra, A. A. (2022). Implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6), 7713–7717.
- Zaelani. (2012). Komitmen Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional (Government Commitment In The Implementation Of National Social Security). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(2), 191–206.